

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK
FUNGSI PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROPINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

YOGIE PRIMAL
Nim : 2005/67880

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
UNTUK FUNGSI PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROPINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SI) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

YOGIE PRIMAL
Nim : 2005/67880 ,

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

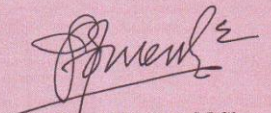
ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK FUNGSI PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA BARAT

Nama : Yogie Primal
TM/NIM : 2005/67880
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

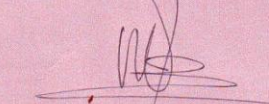
Padang, September 2012

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

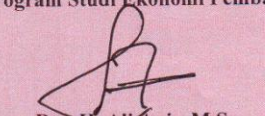

Drs. Akhirmen, M.Si
NIP: 19621105 198703 1 002

Pembimbing II


Muhammad Irfan, SE, M.Si
NIP: 19770409 200312 1 002

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan


Drs. H. Ali Anis, M.S
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

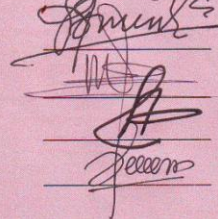
**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK
FUNGSI PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA BARAT**

Nama : Yogie Primal
BP/NIM : 2005/67880
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Prodi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, september 2012

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	: Drs.Akhirmen, M.Si
2.	Sekretaris	: Muhammad Irfan, SE, M.Si
3.	Anggota	: Drs. H.Ali Anis, M.S
4.	Anggota	: Dewi Zaini Putri, SE, MM

Tanda Tangan



ABSTRAK

Yogie Primal, (2005/67880): Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah Bimbingan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si dan Bapak Muhammad Irfan, S.E, M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Pengaruh pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, (2) pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, (3) pengeluaran pemerintah untuk fungsi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, (4) Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. (5) Pengaruh pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan data panel yaitu kombinasi 16 dari 19 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat dari tahun 2007 sampai 2009, dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effects (FEM)*. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini mencakup (1) Uji Multikolinearitas. (2) Uji Heterokedastisitas. (3) Uji Autokorelasi. (4) Analisis regresi panel. (5) Uji t. (6) Uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ($\text{sig} = 0,000 < \alpha = 0,05$) dengan besar pengaruhnya 0,234 persen. (2) pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ($\text{sig} = 0,040 < \alpha = 0,05$) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,090 persen. (3) pengeluaran pemerintah untuk fungsi infrastruktur berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ($\text{sig} = 0,005 < \alpha = 0,05$) dengan tingkat pengaruh sebesar -0,060 persen. (4) Tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ($\text{sig} = 0,240 > \alpha = 0,05$) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,049 persen. (5) Pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ($\text{sig} = 0,000 < \alpha = 0,05$). Kontribusi secara bersama-sama dari variabel independent yang digunakan terhadap variabel dependent adalah sebesar 99,9 persen.

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah daerah untuk bisa menggali sumber-sumber penerimaan daerah tanpa merusak tataran ekonomi daerah, dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengalokasikan belanja daerah yang pro kepada kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan pemerintahan dengan tata kelola yang baik (*good governance*), dengan cara melibatkan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat”***. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs.Akhirmen,M.Si dan Bapak Muhammad Irfan,SE,M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.Akhirmen,M.Si, Bapak Muhammad Irfan,SE,M.Si, Bapak Drs.H. Ali Anis, M.S dan Ibuk Dewi Zaini Putri,SE,MM selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
4. Ibuk Novya Zulfa Riani, SE. M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana ekonomi.

5. Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan dan saran yang bermanfaat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
7. Teristimewa penulis persembahkan buat Ayahanda tercinta (Zainal Abidin). Dan Ibunda tercinta (Nelizarwati) serta seluruh keluarga yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan- rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan NR angkatan 2005.
9. Rekan- rekan seperjuangan pada Fakultas Ekonomi khususnya, dan Universitas Negeri Padang pada umumnya.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, Juni 2012
Penulis

Yogie Primal

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Pembatasan Masalah.....	16
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan Penelitian.....	18
F. Kegunaan	18

BAB II. KAJIAN TEORI KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori	
1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi	19
2. Konsep Peran dan Campur Tangan Pemerintah	27
3. Konsep Pengeluaran Pemerintah	29
4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	36
B. Studi Terdahulu	41
C. Kerangka Konseptual	42
D. Hipotesis	44

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data	47

D. Teknik dan Pengumpulan Data	48
E. Variabel Penelitian	49
F. Defenisi Operasional	49
G. Teknik Analisis Data	51
1. Analisis Deskriptif.....	51
2. Analisis Induktif	52
a. Uji Asumsi Klasik	52
1) Uji Multikolinearitas	52
2) Uji Heterokedastisitas.....	53
3) Uji Autokorelasi	54
b. Model Regresi Panel (<i>Pooled Analysis</i>)	55
c. Koefisien Determinan (R^2)	60
d. Pengujian Hipotesis	61
1) Uji t.....	61
2) Uji F	62

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	64
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	64
a. Letak Geografis Sumatera Barat.....	64
b. Iklim	65
c. Penduduk	66
d. Ketenagakerjaan	67
e. Pendidikan	67
2. Deskripsi Variabel Penelitian	68
a. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi 16 dari 19 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat.....	68
b. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Pendidikan	70
c. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Kesehatan	72
d. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi infrastruktur	73

3. Analisis Induktif	75
a. Uji Asumsi Klasik	75
1) Uji Multikolinearitas	75
2) Uji Heterokedastisitas.....	76
3) Uji Autokorelasi	79
b. Analisis Model Regresi Panel.....	80
1) Chows-Test (Likelihood Ratio Test)	80
2) Uji Hausman	81
3) Analisis Model Regresi Panel.....	82
c. Koefisien Determinan (R^2)	86
d. Pengujian Hipotesis	87
1) Uji t.....	87
2) Uji F.....	89
B. Pembahasan	90
1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Sumatera Barat	91
2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat	93
3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat	95
4. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat.....	96
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan PDRB atas Harga Konstan 2000.....	4
2. Proporsi Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Pendidikan di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat.....	8
3. Proporsi Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi kesehatan di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat	10
4. Proporsi Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi kesehatan di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat	12
5. Jumlah Angkatan Kerja Yang Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan di propinsi Sumatera Barat.....	14
6. Klasifikasi Nilai d (D-W)	55
7. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.....	69
8. Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Pendidikan di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat.....	71
9. Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi kesehatan di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat.....	72
10. Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi infrastruktur di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat.....	74
11. Hasil Uji Multikolinearitas	76
12. Hasil Estimasi Uji Heterokedastisitas.....	77
13. Hasil Uji Autokorelasi	79
14. Hasil Uji Chows Test.....	81
15. Hasil Uji Hausman.....	82
16. Hasil Estimasi Regresi Panel	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Mentah.....	105
2. Hasil Uji Regresi Panel.....	107
3. Hasil Uji Multikolinearitas	108
4. Hasil Uji Heterokedastisitas	112
5. Hasil Uji Autokorelasi	113
6. Hasil Uji Chow Test	114
7. Hasil Uji Hausman.....	114
8. Tabel t	115
9. Tabel F	118
10. Tabel Durbin-Watson (DW).....	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner.....	34
2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Menurut Peacock dan Wiseman	36
3. Kerangka Konseptual Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat.....	43

Bab I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu ; modal, tenaga kerja dan teknologi (Soekirno,1994:456).

Laju pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan adanya peranan masing-masing sektor perekonomian disegala bidang yang akan terlihat dari kontribusi pada PDRB, meskipun pertumbuhan ekonomi yang digambarkan oleh pertumbuhan PDRB belum mencerminkan kesejahteraan suatu daerah, tapi setidaknya dapat mencerminkan kemajuan perekonomian suatu daerah.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan dana yang sangat besar demi mendorong tumbuhnya investasi, karena investasi merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, dengan adanya investasi akan

meningkatkan pendapatan daerah melalui output yang akan dihasilkannya, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus terus menerus berupaya melalui berbagai kebijakan, salah satunya yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan ini pada akhirnya akan meningkatkan investasi. Kebijakan fiskal menyangkut tentang pajak dan pembelian pemerintah.

Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan bahkan penerimaan yang berasal dari pinjaman atau bantuan luar negeri yang sebelum masa reformasi dikategorikan sebagai penerimaan negara.

Keynes mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh permintaan agregat (*agregat demand*), yaitu permintaan yang disertai kemampuan membayar barang dan jasa yang diminta dan wujud dalam perekonomian. Dalam permintaan agregat, permintaan barang-barang dan jasa-jasa akan dipengaruhi oleh konsumsi (C), Investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan perdagangan luar negeri yang terdiri dari ekspor (X) dan impor (M). Apabila salah satu komponen permintaan agregat mengalami perubahan, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan PDRB, sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar

pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah Propinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diukur dari perkembangan PDRB dari tahun ke tahunnya. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas harga konstan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pelaksanaan pembangunan yang digariskan, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan nilai tambah berbagai macam sektor ekonomi yang terjadi.

Pembangunan di Propinsi Sumatera Barat yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat propinsi maupun di kabupaten/kota.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Sumatera Barat pada periode 2005-2009 mengalami fluktuasi dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dan Propinsi lain di Sumatera, ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat sumber daya alam, prasarana penunjang relatif sama dibanding propinsi lain.

Tabel 1
Perkembangan Produk Domestik Regional Broto (PDRB)
di Kabupaten/kota Propinsi Sumatera Barat Priode 2006-2010
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Total PDRB	(%)
2006	31.562.318,60	-
2007	33.471.906,72	6,05
2008	35.511.098,77	6,09
2009	37.408.865,03	5,34
2010	39.607.224,38	5,88
Jumlah	177.561.413,50	-
Rata-rata	35.512.282,70	5,84

Sumber: BPS Sumbar (data diolah tahun 2012)

Pada Tabel. 1 dapat dilihat bahwa total PDRB di propinsi Sumatera Barat cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2006 sampai 2008 laju pertumbuhan PDRB propinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan, yaitu 6,05% pada tahun 2007, dan 6,09% pada tahun 2008, namun pada tahun 2009 laju pertumbuhan PDRB mengalami penurunan menjadi 5,34%. Penurunan pertumbuhan PDRB ini kemungkinan disebabkan terjadinya Gempa Bumi di propinsi Sumatera Barat pada tahun 2009, besarnya gunjangan gempa 7,6 SR tersebut menyebabkan infrastruktur publik maupun swasta mengalami kerusakan, sehingga pelayanan publik seperti kantor-kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah, kantor-kantor perbankan, toko,

swalayan dan lain-lain tidak dapat melakukan pungsi dan peranannya dalam perekonomian.

Ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan teknologi. Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah diberbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi *social overhead capital* (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik. namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan akan terdorong naik dengan adanya berbagai fasilitas publik.

Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam bernegara yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka pelaksanaan pembangunan menjadi hal yang sangat penting. Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, menjaga kestabilan harga, mengatasi masalah pengangguran, menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata. Melalui pembangunan ini diharapkan akan terjadi peningkatan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan, yaitu dengan dengan cara meningkatkan komsumsinya atau bisa disebut belanja pemerintah.

Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan

produktifitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Sedangkan pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan yang anggarannya selalu disesuaikan dengan besarnya dana yang berhasil dimobilisasi.

Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dapat menggunakannya untuk mengelola perekonomian negara. APBN pada perkembangannya telah mengalami banyak perubahan struktur. APBN saat ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan UU No.1 tahun 2004. Sejak tahun 1969 diterapkan sistem berimbang dan dinamis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sistem anggaran berimbang dan dinamis ini menggantikan sistem anggaran sebelumnya pada masa orde lama yang belum membedakan antara anggaran belanja dengan penerimaan. Pembedaan antara anggaran belanja dengan penerimaan akan mempermudah mengetahui berapa besar anggaran belanja pemerintah untuk sektor publik. Sistem penyusunan yang berimbang dan dinamis didasarkan pada *Indische Comptabiliteitswet* yang lebih dikenal dengan nama ICW stbl. 1925 No.488 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867. Kemudian pada tahun 2003 dikeluarkan UU No.17/2003 tentang pengelolaan keuangan negara. Undang-undang tersebut menandai dimulainya reformasi manajemen keuangan pemerintah.

Pengeluaran pemerintah atau disebut juga belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus

dan dana penyeimbang. Anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pada saat sebelum diundangkannya UU No. 17/2003. UU No.17/2003 mengenalkan sistem *unified budget* sehingga tidak lagi ada perbedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu dan bagaimana proporsinya terhadap penghasilan nasional. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu tolak ukur yang sangat kasar terhadap kegiatan/peranan pemerintah dalam suatu perekonomian.

Pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Efek pembangunan pada ketiga sektor tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat *time lag* ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja Negara untuk ketiga sektor tersebut dengan dampak kebijakan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan runtun waktu (*time series*) cukup panjang.

Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada ketiga sektor tersebut terhadap

pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah dalam pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan menyebabkan peningkatan kualitas modal manusia dan prasarana fisik, hal ini juga akan memacu investasi ekonomi. Investasi ekonomi selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena banyaknya modal yang tersedia untuk pembangunan. Hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional dan hasilnya adalah pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal itu dapat dilihat dari tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2
Proporsi Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Pendidikan
di Kabupaten/kota Propinsi Sumatera Barat periode 2008-2010
(jutaan rupiah)

Kab/kota	Tahun					
	2008	prop orsi (%)	2009	prop orsi (%)	2010	prop orsi (%)
1. Kab. Lima Puluh Kota	234.306,49	7,85	276.954,00	8,58	268.800,00	7,71
2. Kab. Agam	277.959,03	9,31	316.785,00	9,82	295.731,00	8,48
3. Kab. Kepulauan Mentawai	75.888,09	2,54	110.676,00	3,43	100.379,00	2,88
4. Kab. Padang Pariaman	233.316,05	7,82	264.974,00	8,21	271.432,00	7,78
5. Kab. Pasaman	139.377,94	4,67	164.337,00	5,09	160.537,00	4,60
6. Kab. Pesisir Selatan	237.209,00	7,95	256.215,00	7,94	274.736,00	7,88
7. Kab. Sijunjung	127.470,04	4,28	148.677,00	4,61	154.456,00	4,43
8. Kab. Solok	189.546,78	6,35	226.033,00	7,00	241.448,00	6,92
9. Kab. Tanah Datar	216.504,95	7,25	268.919,00	8,33	250.363,00	7,18
10. Kota Bukit Tinggi	95.789,28	3,21	132.758,00	4,11	118.053,00	3,38
11. Kota Padang Panjang	68.618,82	2,30	77.464,00	2,40	74.953,00	2,15

12. Kota Padang	378.168,32	12,67	444.320,00	13,77	458.541,00	13,15
13. Kota Payakumbuh	98.771,26	3,31	111.847,00	3,47	107.605,00	3,09
14. Kota Sawahlunto	72.938,29	2,44	84.139,00	2,61	80.247,00	2,30
15. Kota Solok	79.064,01	2,65	120.294,00	3,73	116.348,00	3,34
16. Kota Pariaman	94.580,96	3,17	102.964,00	3,19	108.695,00	3,12
17. Kab. Pasaman Barat	148.282,17	4,97	162.316,00	5,03	159.406,00	4,57
18. Kab. Dharmas Raya	123.188,16	4,13	125.451,00	3,89	144.313,00	4,14
19. Kab. Solok Selatan	93.638,86	3,14	108.900,00	3,37	101.848,00	2,92
Jumlah	2.984.618,50	100	3.227.069,00	100	3.487.891,00	100
Rata-rata	157.085,18	-	169.845,74	-	183.573,21	-

Sumber : *djpkp.depkeu.go.id.2010*

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2008 sampai tahun 2010 proporsi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mengalami fluktuasi. Jumlah proporsi pengeluaran pemerintah terbesar terdapat pada Kota Padang dan terendah terdapat pada kota Padang Panjang. Hal itu dikarenakan kota Padang yang merupakan pusat pemerintahan Propinsi Sumatera Barat sekaligus Ibukota Propinsi Sumbar.

Pada tabel 2 juga dapat dilihat total pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup besar dari Rp 2.984.618,50 pada tahun 2008 dan menjadi Rp 3.487.891,00 pada tahun 2010. Hal ini disebabkan karena besarnya perhatian pemerintah pada sektor pendidikan, karena pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat. Semakin tinggi dan berkualitas tingkat pendidikan maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Sehingga perhatian pemerintah terhadap pendidikan harus besar, karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3
Proporsi Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Kesehatan
di Kabupaten/kota Propinsi Sumatera Barat periode 2008-2010
(jutaan rupiah)

Kab/kota	Tahun					
	2008	prop orsi (%)	2009	prop orsi (%)	2010	Prop orsi (%)
1. Kab. Lima Puluh Kota	50.817,47	6,24	50.092,00	5,61	48.710,00	5,27
2. Kab. Agam	61.241,18	7,52	55.508,00	6,22	60.594,00	6,55
3. Kab. Kepulauan Mentawai	59.454,23	7,30	59.080,00	6,62	62.143,00	6,72
4. Kab. Padang Pariaman	44.581,21	5,47	48.058,00	5,38	61.688,00	6,67
5. Kab. Pasaman	43.930,16	5,39	42.754,00	4,79	42.473,00	4,59
6. Kab. Pesisir Selatan	49.359,52	6,06	53.246,00	5,96	52.121,00	5,64
7. Kab. Sijunjung	71.559,42	8,79	69.183,00	7,75	72.016,00	7,79
8. Kab. Solok	47.188,31	5,80	41.443,00	4,64	41.248,00	4,46
9. Kab. Tanah Datar	45.861,71	5,63	56.803,00	6,36	57.157,00	6,18
10. Kota Bukit Tinggi	17.535,53	2,15	19.853,00	2,22	22.921,00	2,48
11. Kota Padang Panjang	27.343,97	3,36	45.548,00	5,10	50.037,00	5,41
12. Kota Padang	55.501,42	6,82	68.122,00	7,63	70.335,00	7,60
13. Kota Payakumbuh	39.458,51	4,85	48.521,00	5,44	47.657,00	5,15
14. Kota Sawahlunto	36.569,23	4,49	42.676,00	4,78	43.031,00	4,65
15. Kota Solok	17.613,51	2,16	34.081,00	3,82	31.627,00	3,42
16. Kota Pariaman	25.714,43	3,16	28.628,00	3,21	26.543,00	2,87
17. Kab. Pasaman Barat	44.339,63	5,45	47.987,00	5,38	53.013,00	5,73
18. Kab. Dharmas Raya	44.049,50	5,41	46.656,00	5,23	49.469,00	5,35
19. Kab. Solok Selatan	33.654,84	4,13	34.411,00	3,85	32.167,00	3,48
Jumlah	814.285,94	100	892.650,00	100	924.950,00	100
Rata-rata	42.857,15	-	46.981,58	-	48.681,58	-

Sumber : *djpkp.depkeu.go.id.2010*

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa proporsi pengeluaran pemerintah untuk kesehatan mengalami fluktuasi dari tahun 2008 sampai 2010. Ada daerah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan ada juga yang tidak. Jumlah proporsi pengeluaran pemerintah terbesar terjadi pada Kabupaten Sijunjung. Hal itu dimungkinkan karena rendahnya kualitas kesehatan di Kabupaten Sijunjung tersebut. Serta rendahnya sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas ataupun rendahnya tingkat pelayanan di kabupaten tersebut. Sehingga pemerintah harus melakukan pengeluaran yang lebih besar, agar tingkat kesehatan di Kabupaten Sijunjung tersebut menjadi lebih baik.

Pada tabel 3 di atas juga dapat dilihat total pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan di Propinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai tahun 2010, yang mana pada tahun 2008 total pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan sebesar Rp 814.285,94 menjadi Rp 924.950,00 pada tahun 2010. Meningkatnya pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan hal ini kemungkinan disebabkan besarnya perhatian pemerintah pada sektor kesehatan karena kesehatan memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan kualitas kesehatan bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Provinsi Sumatera Barat, semakin tinggi angka harapan hidup maka semakin lama masa produktivitas tenaga kerja dan semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4
Proporsi Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Perumahan
dan Fasilitas Umum
di Kabupaten/kota Propinsi Sumatera Barat periode 2008-2010
(jutaan rupiah)

Kab/kota	Tahun					
	2008	proporsi (%)	2009	proporsi (%)	2010	proporsi (%)
1. Kab. Lima Puluh kota	131.352,21	9,44	94.987,00	6,81	67.411,00	6,36
2. Kab. Agam	85.416,90	6,14	87.198,00	6,25	35.096,00	3,31
3. Kab. Kepulauan Mentawai	93.229,19	6,70	126.978,00	9,10	79.075,00	7,46
4. Kab. Padang Pariaman	93.503,07	6,72	100.948,00	7,23	87.683,00	8,27
5. Kab. Pasaman	52.280,00	3,76	59.761,00	4,28	33.838,00	3,19
6. Kab. Pesisir Selatan	93.510,48	6,72	80.244,00	5,75	92.668,00	8,74
7. Kab. Sijunjung	58.591,14	4,21	67.149,00	4,81	59.677,00	5,63
8. Kab. Solok	64.370,49	4,63	39.713,00	2,85	26.087,00	2,46
9. Kab. Tanah Datar	76.864,20	5,53	69.125,00	4,95	43.310,00	4,08
10. Kota Bukit Tinggi	50.471,93	3,63	75.536,00	5,41	56.408,00	5,32
11. Kota Padang Panjang	40.843,62	2,94	41.136,00	2,95	23.684,00	2,23
12. Kota Padang	73.409,48	5,28	61.820,00	4,43	47.118,00	4,44
13. Kota Payakumbuh	38.956,00	2,80	36.886,00	2,64	33.436,00	3,15
14. Kota Sawahlunto	25.594,83	1,84	24.435,00	1,75	58.546,00	5,52
15. Kota Solok	62.017,39	4,46	41.753,00	2,99	25.571,00	2,41
16. Kota Pariaman	67.088,10	4,82	57.428,00	4,12	43.123,00	4,07
17. Kab. Pasaman Barat	89.449,20	6,43	88.254,00	6,32	78.362,00	7,39
18. Kab. Dharmas Raya	105.474,10	7,58	153.294,00	10,99	97.191,00	9,16
19. Kab. Solok Selatan	88.436,29	6,36	88.838,00	6,37	72.355,00	6,82
Jumlah	1.390.858,62	100	1.395.483,00	100	1.060.639,00	100
Rata-rata	73.203,08	-	73.446,47	-	55.823,11	-

Sumber : djpkp.depkeu.go.id.2010

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa proporsi pengeluaran pemerintah atas perumahan dan fasilitas umum di Provinsi Sumatera Barat sebagian besar mengalami penurunan pada tahun 2010. Hal tersebut mungkin dikarenakan sarana dan prasarana infrastruktur sudah cukup bagus dan memadai di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran yang besar lagi untuk sektor infrastruktur ini.

Semakin lancar sektor infrastruktur maka semakin mudah pula mobilitas sumber daya ekonomi antar wilayah. Sehingga daerah yang kaya akan sumber daya ekonomi bisa dengan mudah menyalurkan sumberdaya tersebut ke daerah lain. Dengan kata lain dapat dijelaskan semakin bagus infrastruktur maka dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Secara keseluruhan, proporsi pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Propinsi Sumatera Barat sangat diperlukan guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Semakin tinggi tingkat pendidikan disertai dengan tingkat kesehatan yang baik, bahkan didukung oleh infrastruktur yang memadai, maka akan memacu pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Ada beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta

dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya.

Selain investasi, tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah. Pada tabel 5 berikut dapat dilihat jumlah angkatan kerja penduduk yang berusia 15 tahun keatas di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 5
Jumlah Angkatan Kerja Yang Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja
Menurut Tingkat Pendidikan
Di Propinsi Sumatera Barat
(satuan orang)

Tahun	Angkatan Kerja	(%)
2008	1.956.378	-
2009	1.998.922	2,17
2010	2.041.454	2,13
Jumlah	5.996.754	-
Rata-rata	1.998.918	1,43

Sumber : BPS, hasil sakernas, Agustus 2010

Pada tabel 5 di atas dapat dilihat jumlah angkatan kerja di Propinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2006-2010. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini kemungkinan disebabkan karena meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan di Propinsi Sumatera Barat. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan maka jumlah angkatan kerja juga akan meningkat.

Jumlah angkatan kerja tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebanyak 2.041.454 orang. Tingginya jumlah angkatan kerja ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya permintaan dunia industri terhadap tenaga kerja Sumatera Barat. Tingginya permintaan tersebut disebabkan karena bagusnya kualitas pendidikan di Propinsi Sumatera barat.

Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Dari paparan di atas penulis tertarik untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih jelasnya masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan.
2. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan.
3. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah untuk fungsi infrastruktur.
4. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh investasi.
5. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh tenaga kerja.
6. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah untuk fungsi pelayanan umum.
7. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah untuk fungsi lingkungan hidup.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini akan dibatasi untuk menguji : pengaruh pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.

D. Rumusan Masalah

Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi, terutama jenis pengeluaran pemerintah yang menyangkut pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran tersebut adalah pengeluaran untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang sangat penting bagi proses pembangunan. Pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat langsung dirasakan dalam jangka pendek melainkan baru akan terasa dalam jangka panjang.

Penelitian-penelitian terdahulu telah menghasilkan berbagai kesimpulan yang berbeda atas hubungan pengeluaran pemerintah dalam pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten, bisa positif atau negatif. Hasil dan bukti berbeda pada negara maupun daerah. Sifat dari dampak pengeluaran pemerintah akan tergantung dengan kondisi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat?

2. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah untuk fungsi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat?
4. Sejauhmana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat?
5. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat.
2. Pengaruh pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat.
3. Pengaruh pengeluaran pemerintah untuk fungsi Infrastruktur yang terbagi dalam perumahan dan transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat.
4. Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat.
5. Pengaruh pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.

F. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan APBN.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah atas fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi
3. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Soekirno, 2000:10). Setiap negara di dunia sudah lama menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target ekonomi. Kuznets dalam Jhingan (2004:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Definisi ini memiliki tiga komponen: Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel

ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu negara sudah dikelola dengan benar. Menurut Mankiw (2003:16), PDB dapat dipandang dalam dua hal. Pertama, pendapatan total yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian. Kedua, adalah pengeluaran total atas output barang dan jasa dalam perekonomian.

Berdasarkan pendekatan sejarah pertumbuhan negara-negara di dunia, Rostow mencetuskan suatu model tahapan pertumbuhan ekonomi (*the stage of economic growth*). Menurut Rostow bahwa proses pertumbuhan dapat dibedakan ke dalam lima tahap dan setiap negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahapan tersebut. Adapun lima tahapan pertumbuhan tersebut antara lain; tahapan masyarakat tradisional, penyusunan kerangka dasar tahapan tinggal landas menuju pertumbuhan berkesinambungan, tahapan tinggal landas, tahapan menuju kematangan ekonomi, dan tahapan konsumsi massal yang tinggi, Todaro dan Smith (2004:129). Untuk menuju tahap “tinggal landas” Rostow mensyaratkan adanya tabungan dan investasi 15-20 persen dari GNP-nya, diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi secara cepat apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang menabung dari proporsi tersebut. (Todaro dan Smith, 2004:132).

Formula untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2004:18), yaitu:

$$\frac{Y_{rt} - Y_{rt-1}}{Y_{rt-1}} \times 100 \% \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

G_t = Tingkat pertumbuhan ekonomi (%)

Y_t = Pendapatan per kapita pada tahun t

Y_{t-1} = pendapatan per kapita pada tahun $t-1$

Todaro dan Smith (2004:92-96) mengidentifikasikan bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu:

a. Akumulasi Modal

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin dan peralatan dan bahan baku meningkatkan stok modal (*capital stock*) fisik suatu negara yakni total nilai riil netto atas seluruh barang modal produktif secara fisik dan hal itu jelas memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa-masa yang akan datang.

b. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan meningkatkan tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi bagi kebanyakan ekonom merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang terpenting. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Kemajuan teknologi tersebut dapat beragam sifatnya, yaitu; pertama, teknologi yang bersifat netral. Kemajuan teknologi yang netral

terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. Kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, dan ketiga, kemajuan teknologi hemat modal.

Di Negara-negara Dunia Ketiga yang melimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan teknologi hemat modal merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Kemajuan teknologi ini akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien, kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja.

Ketiga faktor di atas juga menjadi determinan penting dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai model pertumbuhan Solow (*Solow Growth Model*). Model ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2003:175).

Dalam model Solow (Mankiw, 2003:176-179) output atau jumlah barang yang dihasilkan dalam perekonomian tergantung pada persediaan modal dan tenaga kerja melalui sebuah fungsi produksi yang memiliki skala hasil konstan.

$$Y = F(K, L) \dots \dots \dots (2)$$

Berdasarkan asumsi skala hasil konstan maka dengan membagi kedua sisi persamaan dengan L (pekerja) maka dapat juga di

identifikasi bahwa output per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja, yaitu $Y/L = F(K/L, 1)$, dan selanjutnya dapat ditulis persamaan $y = f(k)$, yang menggambarkan bahwa output per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja.

Persediaan modal menjadi determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Dua kekuatan utama yang mempengaruhi persediaan modal adalah investasi dan depresiasi. Dalam jangka panjang persediaan modal ini akan menuju suatu tingkat modal pada kondisi mapan (*Steady state level of capital*), yaitu di mana dalam perekonomian berlaku tingkat investasi sama dengan depresiasi sehingga perubahan persediaan modal (k) dan output $f(k)$ adalah tetap. Notasi yang umumnya digunakan untuk menunjukkan kondisi ini adalah k^* , $\Delta k = 0$. Dalam Model Solow dasar ini juga ditunjukkan bagaimana akumulasi modal dengan sendirinya tidak bisa menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan. Artinya meski dalam jangka pendek terjadi pertumbuhan output, tetapi pada akhirnya mendekati kondisi mapan dimana modal dan output adalah konstan, Mankiw (2003)

Dalam Mankiw (2003:194-196), Menurut Solow pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi merupakan variabel lainnya yang turut mempengaruhi output dan perekonomian suatu negara. Sebagaimana depresiasi yang mengurangi persediaan modal per pekerja, pertumbuhan penduduk akan menyebabkan hal yang sama. Artinya semakin besar

jumlah penduduk, maka semakin kecil jumlah modal per pekerja dan berdampak pada rendahnya output per pekerja. Untuk mencapai kondisi mapan, maka dalam perekonomian memerlukan tingkat investasi yang dapat mengoffset pengaruh depresiasi dan pertumbuhan penduduk, atau yang disebut investasi pulang pokok (*break event investment*), yaitu $\Delta k = i - (\delta + n) k$.

Satu hal yang penting di sini adalah bahwa meskipun dalam kondisi mapan modal dan output per pekerja adalah tidak berubah atau konstan. Tetapi model ini bias dimodifikasi untuk mencakup kemajuan teknologi menurut Solow merupakan variabel eksogen yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi sepanjang waktu.

Dengan demikian, berdasarkan model Solow ini, secara bersama-sama pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi memiliki kontribusi penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Wibowo (2008:63) menyatakan bahwa dalam beberapa studi yang mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi perkapita, seperti yang dilakukan Barro (1996), Sachs dan Warner (1997); Sala-i-Martin (1997) Knight, Loayza, dan Villanueva (1993); Mankiw, Romer, dan Weil (1992), serta Levine dan Renelt (1992), terdapat tiga variabels yang selalu terbukti mempunyai hubungan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkapita, yaitu Level awal pertumbuhan ekonomi (*The Initial Level of GDP*), Rasio Investasi terhadap GDP, dan Human Capital Accumulation.

Disamping ketiga variabel ini, hasil studi Levine dan Renelt (1992) dalam Wibowo (2008:64) juga menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan jumlah penduduk (*population growth*) menentukan tingkat kemakmuran ekonomi, disamping itu, Becker et al (1990) berpendapat bahwa dengan asumsi tingkat fertilitas sebagai *endogenous variable*, masyarakat dengan jumlah penduduk yang cukup banyak akan cenderung untuk melakukan investasi lebih di bidang SDM. Di sisi lain, daerah yang jarang penduduknya memiliki insentif ekonomi untuk meningkatkan jumlah anak guna mengisi kekosongan pasar tenaga kerja. Namun demikian, *net impact* terhadap pencapaian kinerja ekonomi tidaklah mudah untuk ditentukan. Diungkapkan pula bahwa populasi dapat menurunkan produktivitas karena adanya efek *diminishing returns* atas penggunaan tanah dan sumber daya alam, Becker et al. 1999 dalam Wibowo (2008:64. Jumlah penduduk yang besar dapat pula mendorong spesialisasi dan meningkatkan pengetahuan di bidang investasi. Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita tergantung dari pemanfaatan ilmu pengetahuan guna mengeliminasi efek *diminishing returns* atas penggunaan sumber daya alam.

Berkaitan dengan level awal pertumbuhan ekonomi (*The Initial Level of GDP*), Renelt 1992 dalam Wibowo (2008:64) menjelaskan bahwa variabel ini penting dalam analisa pertumbuhan ekonomi karena digunakan untuk melihat tingkat pengaruh pertumbuhan ekonomi antar wilayah. pengaruh ini mengindikasikan hubungan negatif antara

pertumbuhan ekonomi dengan *initial per capita regional GDP*. Artinya semakin tinggi level awal pertumbuhan ekonomi (*initial per capita regional GDP*) maka akan semakin rendahnya pertumbuhan ekonomi dalam tahun berikutnya. Sementara itu, porsi investasi dalam Regional GDP diharapkan akan positif karena secara empiris telah ditemukan bahwa investasi di bidang infrastruktur dapat mempengaruhi tingkat produksi di beberapa daerah, Sturm 1998 dalam Wibowo (2008:64).

Berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, Levine dan Renelt 1992 dalam Wibowo (2008:64) mengutarakan bahwa *population growth* menentukan tingkat kemakmuran ekonomi. Disamping itu, Becker et al. (1990) berpendapat bahwa dengan asumsi tingkat fertilitas sebagai *endogenous variable*, masyarakat dengan jumlah penduduk yang cukup banyak akan cenderung untuk melakukan investasi lebih di bidang SDM. Di sisi lain, daerah yang jarang penduduknya memiliki insentif ekonomi untuk meningkatkan jumlah anak guna mengisi kekosongan pasar tenaga kerja. Namun demikian, *net impact* terhadap pencapaian kinerja ekonomi tidaklah mudah untuk ditentukan.

Diungkapkan pula bahwa populasi dapat menurunkan produktivitas karena adanya efek *diminishing returns* atas penggunaan tanah dan sumber daya lainnya (Becker et al, 1999). Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan pendapatan perkapita tergantung dari pemanfaatan ilmu pengetahuan guna mengeliminasi efek *diminishing returns* atas penggunaan sumber daya alam (Wibowo, 2008:64).

2. Konsep peran dan campur tangan pemerintah dalam perekonomian

Pemerintah memiliki peran dalam kehidupan bernegara yang dapat diklasifikasikan menjadi empat macam kelompok peran (Dumairy,1999;56) yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Kegagalan pasar dan eksternalitas mengundang pemerintah untuk turut campur dalam perekonomian. Pemerintah harus merencanakan peraturan dan mengatur penggunaan sumber daya ekonomi yang ada agar teralokasi secara efisien. Peran alokatif ini tidak cukup sekedar melibatkan pemerintah selaku pelindung masyarakat, tapi juga menuntut pengeluaran biaya. Keterlibatan peran dan pengeluaran pemerintah biasanya cukup besar di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, karena pemerintah bertindak pula sebagai pelopor dan pengendali pembangunan.
- b. Peranan distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumberdaya, kesempatan dan hasil.hasil ekonomi secara adil dan wajar. Pemilikan sumber daya , kesempatan dan hasil.hasil ekonomi secara adil dan wajar. Pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi di setiap negeri acap kali tidak setara,baik di antara wilayah.wilayah negara yang bersangkutan maupun diantara sektor.sektor ekonomi. Begitu pula dengan kecenderungan pembagian

hasil.hasilnya. Kesenjangan pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi akan cenderung mengkonsentrasikan kekuatan dan kekuasaan ekonomi di tangan segelintir pihak tertentu. Daya tawar (*bargaining position*) antar pelaku ekonomi menjadi tidak seimbang. Disisi lain ketidakseimbangan daya tawar dapat melemahkan pasar. Peran distributif pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur penerimaan maupun lewat jalur pengeluarannya. Di sisi penerimaan, pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber.sumber pendapatanlainnya untuk kemudian didistribusikan secara adil dan proporsional. Dengan pola serupa pula pemerintah membelanjakan pengeluarannya.

- c. Peran stabilitatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Peranan ini bertolak dari kenyataan objektif sering tidak berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah masalah yang timbul, bahkan kadang.kadang tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Namun kadang kala ketidakberdayaan pihak swasta itu justru diciptakan sendiri secara subjektif oleh pemerintah, dalam arti pemerintah secara apriori berpandangan pihak swasta tidak mampu mengatasi masalahnya.
- d. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh , berkembang dan maju. Peran ini diwujudkan dalam bentuk perintisan

kegiatan. kegiatan ekonomi tertentu. Argumentasi pemerintah bahwa ia harus berperan sebagai dinamisator didukung pula oleh sebuah premis yang dicanangkan dan dikampanyekan sendiri. Karena dialah yang merencanakan dan memodali pembangunan, maka ia merasa paling bertanggung jawab atas pelaksanaannya : atas dasar itu ia merasa berhak melakukan apa saja yang menurutnya pantas ditempuh demi pembangunan.

Keempat macam peranan pemerintah tadi potensial menimbulkan kesulitan penyesuaian atau bahkan pertentangan kebijaksanaan. Sebagai contoh dalam kapasitas selaku stabilisator, pemerintah harus mengendalikan inflasi. Apabila hal itu ditempuh dengan cara mengurangi pengeluarannya, agar permintaan agregat terkendali sehingga tidak menambah memicu kenaikan harga. harga, maka porsi pengeluaran pemerintah untuk lapisan masyarakat atau sektor yang harus dibantu dapat turut dikurangi. Padahal justru dengan pengeluaran itulah pemerintah menjalankan peran distributifnya.

3. Konsep Pengeluaran Pemerintah

a. Teori Pengeluaran Pemerintah

Dalam upaya melihat efek-efek pengeluaran pemerintah pusat terhadap pembentukan pendapatan nasional memerlukan model. Model yang biasa digunakan oleh para ahli ekonomi dewasa ini adalah model *Keynes*. Dalam model sederhananya yang menjadi model komponen permintaan agregat hanyalah pengeluaran konsumsi dan

investasi masyarakat. Dengan demikian keadaan seimbang dirumuskan sebagai persamaan : $Y = C + I$ hanya pada tingkat inilah terjadi keseimbangan pembelian produk-produk akhir (Mankiw, 2000:56).

Mengingat semakin besarnya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa dimana pembelian tersebut merupakan suatu bentuk pengeluaran produk-produk akhir maka perkembangan selanjutnya dari model *Keynes* tersebut sebagai model penentu pendapatan nasional berubah menjadi $Y = C + G + I$, persamaan ini memasukkan pengeluaran pemerintah dalam analisa, dengan demikian maka komponen pengeluaran pemerintah dapat berubah tingkat pendapatan nasional dalam arti riil (Mankiw, 2000:57).

Secara umum yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah adalah total pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Yang dimaksud dengan pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang dilakukan secara rutin, biasanya pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang berbagai macam subsidi (subsidi daerah, subsidi daerah). Angsuran bunga hutang pemerintah serta pengeluaran lainnya. Sedangkan pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membiayai pembangunan, pengeluaran ini bersifat menambah

modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek seperti : jalan raya, jembatan, sekolah, pendidikan dan lain-lain. (*Dumairy, 1996:45*)

Walaupun demikian, yang dimaksud dengan pembangunan pemerintah disini adalah pengeluaran pembangunan, karena pengeluaran pembangunan juga merupakan investasi pemerintah yang secara langsung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori ini dapat digolongkan menjadi menjadi dua bagian, diantaranya yaitu teori Makro yang terdiri dari : (*Mangkoesebroto, 2001:169-180*)

- 1) Teori pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah

WW Rostow dan RA Musgrave (dalam *Mangkoesebroto 2001:170*) menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal itu dikarenakan pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetapi

besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak kegagalan pasar yang ditimbulkan perkembangan ekonomi itu sendiri, yaitu kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan. Dalam suatu proses pembangunan, menurut *Musgrave* Rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan semakin mengecil. Sementara itu *Rostow* berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktifitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak Negara, tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain itu tidak jelas, apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap, atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

2) Hukum Wagner

Pengamatan empiris oleh *Adlf Wagner* (dalam Mangkoesoebroto 2001:171) terhadap Negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktifitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Temuannya

oleh Musgrave dinamakan hukum pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat (*law of growing public expenditures*). Wagner sendiri menamakannya hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (*law of ever increasing state activity*).

Hukum tersebut dapat dirumuskan dengan notasi :

$$\frac{GpCt}{YpCt} > \frac{GpCt}{YpCt - 1} > \frac{GpCt - 2}{GpCt - 2} > \dots > \frac{GpCt - n}{YpCt - n}$$

GpC : pengeluaran pemerintah perkapita

YpC : produk atau pendapatan nasional perkapita

t : indeks waktu

Hukum *Wagner* juga dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} \dots \dots \dots < \frac{P_n PP_n}{PPK_n}$$

Dimana :

$P_k PP$: pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah pendapatan

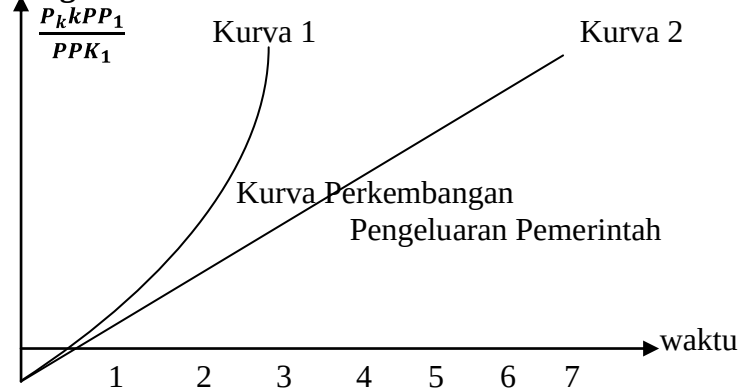
1,2,...,n : jangka waktu (tahun)

Menurut *Wagner* ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan

ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

Hukum *Wagner* ditunjukkan dalam gambar 1.1 di bawah ini, dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner



Sumber : Guritno Mangkoesoebroto, 1993:172

3) Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman (dalam Mangkoesoebroto 2001:173) mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis “*dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah*”. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar.

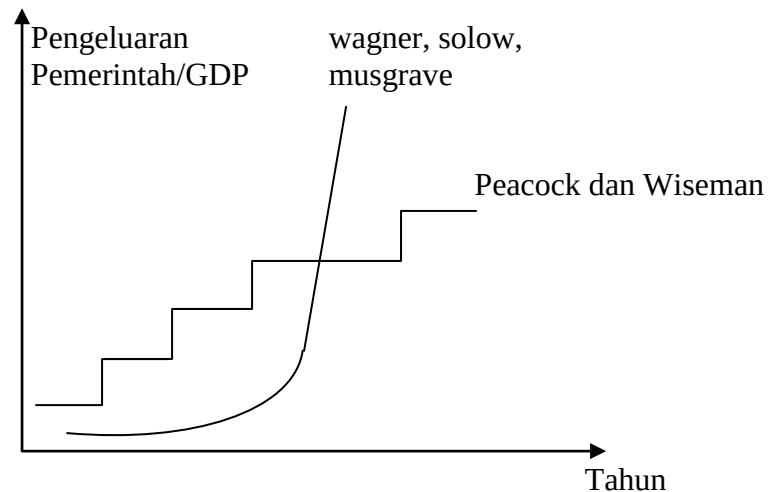
Menurut *Peacock-Wiseman*, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat yang meskipun tarif

pajaknya mungkin tidak berubah, pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula.

Jadi dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal jadi terganggu, katakanlah karena perang atau eksternalitas lainnya, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan dimaksud. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*), yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Suatu hal yang perlu dicatat dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa mereka mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapakah toleransi pajak tersebut.

Gambar 1.2
Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah



Sumber : Guritno Mangkoesoebroto, 1993:175

4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah.

Menurut E.Setiawan (2006:53) implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup /

investasi sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Asumsi yang digunakan dalam teori human capital adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human

capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (E.Setiawan,2006:53).

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Menurut penelitian yang dilakukan Tri Haryanto (2005:54) menunjukkan bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan.

c. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Fungsi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur tidak kalah pentingnya dengan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, beberapa diantaranya yang cukup dominan dalam pembangunan ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu melakukan pemerataan pembangunan kemudian melakukan pembangunan infrastruktur keseluruhan bagian wilayahnya. Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan pembangunan infrastruktur.

Menurut kajian ilmiah yang dilakukan Deni Friawan (2008:56) menjelaskan setidaknya ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi, misalnya studi The World Bank (2004) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam beberapa tahun terakhir pasca krisis ekonomi 1998 salah satunya dipengaruhi rendahnya tingkat investasi. Kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hambatan utama dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Penurunan tarif akibat integrasi ekonomi tidak

dapat menjamin bahwa akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tanpa adanya dukungan dari infrastruktur yang memadai. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara-negara di Asia dan juga mempercepat integrasi perekonomian Asia.

Permasalahan infrastruktur di Indonesia diakibatkan oleh masalah sektoral dan lintas sektoral. Maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjembatani sektor-sektor terkait. Seperti dari sisi pembiayaan pemerintah diharapkan mampu membuat mekanisme penentuan resiko investasi dan mengembangkan metodologi yang dapat secara mudah diterapkan. Di saat bersamaan, mengingat mobilisasi investasi dari sektor swasta membutuhkan waktu, pemerintah diharapkan tetap memberikan perhatian pada peningkatan investasi publik sehingga kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi, salah satunya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur. Namun jika pengeluaran pemerintah saja tidak cukup diperlukan peran pihak swasta. Peran pemerintah untuk meningkatkan perhatian pihak swasta adalah dengan bantuan pembebasan lahan, subsidi operasional dan modal, dan jaminan resiko usaha. Peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur juga harus diikuti dengan efektifitas dan efisiensi dari pengeluaran tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun dan agar terciptanya transparansi dalam proses pengadaan barang dan pembangunan.

5. Studi Terdahulu

- a. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang diteliti oleh Yunan pada tahun 2009. Variabel yang ditelitinya yaitu tentang pengaruh kredit perbankan, pengaruh nilai ekspor, pengaruh pengeluaran pemerintah, dan pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitiannya yaitu keempat variabel yang ditelitinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diteliti oleh Maria Cristina Malau pada tahun 2005. Variabel yang ditelitinya yaitu tentang pengaruh pengeluaran rutin dan pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil penelitiannya yaitu pengeluaran rutin berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pengeluaran rutin, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi. Dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan. Apabila pengeluaran pembangunan meningkat, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- c. Analisis pengaruh investasi, inflasi, pengeluaran pemerintah, penawaran uang dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1981-2006, yang diteliti oleh Muhammad Arif Yusuf. Variabel yang ditelitinya yaitu tentang seberapa besar pengaruh investasi, inflasi,

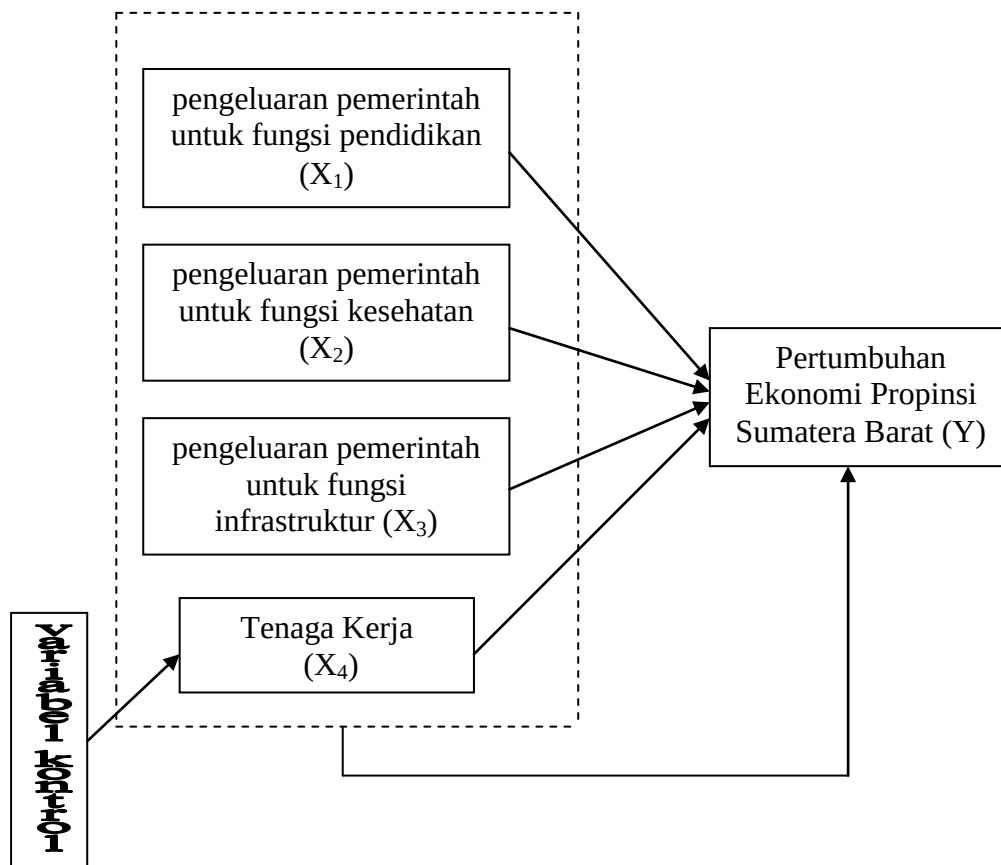
pengeluaran pemerintah, penawaran uang, dan ekspor terhadap perkembangan produk domestik bruto (PDB).

- d. Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah, yang diteliti oleh Deddy Rustiono, SE tahun 2008. Variabel yang ditelitinya yaitu tentang pengaruh realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pengaruh jumlah angkatan kerja, dan pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. Hasil penelitiannya yaitu semua variabel yang ditelitinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah.
- e. Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor, kurs terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1980-2004, yang diteliti oleh Esti Tunggal Birawati tahun 2007. Variabel yang ditelitinya yaitu tentang seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor dan kurs terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran ini dimaksudkan dengan konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan persepsi keterkaitan antara variable yang akan diteliti berdasarkan rumusan masalah. Pada penelitian ini, pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan (X_2), pengeluaran pemerintah untuk fungsi infrastruktur (X_3), dan tenaga kerja

(X_4) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat (Y). Untuk lebih jelas kaitan variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema konseptual berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual dari Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan, Dan infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor pemicu terjadi pertumbuhan ekonomi. Karena pengeluaran pemerintah atau pengeluaran pembangunan merupakan investasi pemerintah yang secara langsung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila semakin besar pengeluaran pemerintah maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan model yang dinyatakan Keynes yang mana $Y = C + I + G$. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu, konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah. Apabila salah satu dari variabel tersebut mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan ikut meningkat. Berbagai sektor pengeluaran yang dilakukan pemerintah, diantaranya pengeluaran untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pengeluaran untuk fungsi pendidikan dilakukan agar tingkat pendidikan penduduk tinggi dan berkualitas, sehingga bisa meningkatkan pendapatan perkapita, pendapatan nasional yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan kesehatan, apabila tingkat kesehatan bagus, maka masyarakat bisa menghasilkan suatu produktifitas yang akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada sektor infrastruktur, fungsi infrastruktur sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi.

Tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja terdidik yang besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja yang produktif. Tenaga kerja yang produktif mempengaruhi produksi, dan selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka dapat dikemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang hendak

dibahas dalam penelitian ini. Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Secara parsial, Pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat

$$H_o : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Secara parsial, Pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat

$$H_o : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Secara parsial, Pengeluaran pemerintah untuk fungsi infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat

$$H_o : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Secara parsial, Tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat

$$H_o : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

5. Variabel pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan (PP), pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan (PK), pengeluaran

pemerintah untuk fungsi infrastruktur (PI), serta variabel kontrol yaitu: tenaga kerja (TK), secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu } \beta \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan analisis regresi panel dan pembahasan terhadap hasil penelitian, antara variabel bebas: pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan, pengeluaran pemerintah untuk fungsi infrastruktur sebagai variabel penjelas dan variabel Kontrol yaitu tenaga kerja terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Dimana nilai signifikan yang diperoleh adalah $\text{sig } 0,000 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan selama tahun 2008-2010, pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, dengan besar pengaruhnya adalah 0,2343 persen, karena tingginya kualitas pendidikan akan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
2. Pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Dimana nilai signifikan yang diperoleh adalah $\text{sig } 0,0395 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan selama tahun 2008-2010, pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi di Sumatera Barat sebesar 0,040 persen, karena tingginya kualitas kesehatan akan dapat meningkatkan produktifitas yang selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

3. Pengeluaran pemerintah untuk fungsi infrastruktur berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Dimana nilai signifikan yang diperoleh adalah $\text{sig } 0,005 < 0,05$ dengan tingkat pengaruh sebesar -0,060 persen. Hal ini mengindikasikan selama tahun 2008-2010, pengeluaran pemerintah untuk fungsi infrastruktur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, karena semakin bagus sarana dan prasarana transportasi akan dapat meningkatkan mobilitas barang serta meningkatkan investasi asing karena lancarnya sarana untuk mobilitas barang yang selanjutnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
4. Tenaga kerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat. Dimana nilai signifikan yang diperoleh adalah $\text{sig } 0,240 < 0,05$ dengan tingkat pengaruhnya sebesar 0,049 persen, Artinya peran serta tenaga kerja kurang memiliki peran penting dalam suatu perekonomian baik menghasilkan maupun menciptakan suatu barang dan jasa, sehingga manfaat yang ditimbulkan kurang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.
5. Pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan tenaga kerja secara bersama-sama mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat. Kontribusi secara bersama-sama dari variabel independent yang digunakan terhadap variabel dependent adalah sebesar 99,9 persen

B. Saran

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari hasil penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, disarankan kepada pemerintah untuk lebih memprioritaskan lagi perhatiannya pada sector ini, agar laju pertumbuhan ekonomi bias lebih ditingkatkan untuk kedepanya.
2. Mengingat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan penduduknya, untuk itu disarankan agar pemerintah tidak melupakan hal ini dan terus menjadi perhatian untuk lebih meningkatnya kualitas kesehatan penduduk, sehingga produktivitas dapat ditingkatkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Dengan terdapatnya pengaruh yang signifikan dan positif antara pengeluaran pemerintah untuk fungsi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat, diharapkan agar pemerintah dapat lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana infrastruktur, karena semakin baiknya kondisi sarana dan prasarana infrastruktur maka mobilitas kegiatan perekonomian juga akan semakin lancar, sehingga hal tersebut juga akan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.
4. Dengan tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan antara tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat, diharapkan penggunaan dan penempatan tenaga kerja kiranya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut akan memberikan alternatif penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
5. Pada penelitian ini masih banyak variabel-variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat, untuk itu perlu adanya penelitian lanjutan sehingga dapat memberikan masukan yang lebih lengkap dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, Nobuo,dkk, 2007. “Complementarity,Fiscal Decentralization and Economic Growth, Economics of Governance.” Heidelberg: Sep 2007. Vol. 8, Iss. 4; p. 339.
- Badan Pusat Statistik. *Sumbar dalam Angka 2007*. Propinsi Sumatera Barat : BPS
- _____. *Sumbar dalam Angka 2008*. Propinsi Sumatera Barat : BPS
- _____. *Sumbar dalam Angka 2009*. Propinsi Sumatera Barat : BPS
- _____. *Sumbar dalam Angka 2010*. Propinsi Sumatera Barat : BPS
- _____. *Sumbar dalam Angka 2011*. Propinsi Sumatera Barat : BPS
- Bastias, Dwi Desi, 2010, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Semarang
- Dumairy, 1999, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- Birawati, Esti Tunggal, 2007. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Ekspor, dan Kurs Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Surakarta
- _____, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta